

## BAB II

### SEJARAH DAN KONSEP PLURALISME AGAMA

#### A. Definisi Pluralisme Agama

Kata pluralisme terdiri dari dua suku kata yaitu *plural* yang berarti jamak; lebih dari satu, dan *isme* sufiks pembentuk nomina sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pluralisme berarti keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).<sup>1</sup>

Definisi pluralisme ini, senada dengan pendapat Syafa'atun Elmirzanah yang mengatakan, bahwa istilah 'pluralisme' mempunyai arti 'beragam', dan pendapat orang tentang pluralisme, juga beraneka ragam pula. Secara harfiah, pluralisme berarti jamak, beberapa, berbagai hal, keberbagaian atau banyak. Oleh karenanya, sesuatu dikatakan plural pasti terdiri dari banyak hal jenis, berbagai sudut pandang serta latar belakang.<sup>2</sup>

Selanjutnya, pemikiran pluralisme agama yang terkenal dan kontroversial adalah dari John Hick.

John Hick adalah seorang filsuf agama kontemporer yang *concern* terhadap pluralisme dan hubungan antaragama. Dalam pengertian dan pemaknaan Hick, pluralisme agama mesti didefinisikan dengan cara menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara normatif. Oleh karenanya dalam pandangan Hick, cara yang lebih arif untuk memahami kebenaran agama-agama lain adalah dengan menerima bahwa semua agama

---

<sup>1</sup>(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 77.

<sup>2</sup>Syafa'atun Elmirzanah, et.al., *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 7.

mempresentasikan banyak jalan menuju ke Satu Realitas Tunggal, yaitu Tuhan yang membawa kebenaran dan keselamatan. Tidak ada satu jalan (agama) pun yang boleh mengklaim lebih benar daripada yang lain karena kita (semua agama) sama dekat dan sama jauhnya dari Realitas Tunggal tersebut. Realitas tunggal itu adalah realitas yang sama yang semua agama sedang mencari-Nya.<sup>3</sup>

Tokoh lain adalah Wilfred Cantwell Smith.

Smith adalah seorang sejarawan agama yang memiliki pengalaman langsung dengan berbagai macam agama ketika mengajar di India pada tahun 1941-1945. Menurut Smith, pluralisme agama merupakan tahapan baru yang sedang dialami dunia agama-agama. Syarat utama tahapan ini ialah kita semua diminta untuk memahami tradisi-tradisi keagamaan lain disamping tradisi keagamaan kita sendiri.<sup>4</sup>

Sedangkan Menurut Peter L. Berger, Pluralisme itu lahir dari sebuah rahim globalisasi sebab pada era ini pluralisme hampir seperti pasar globalisasi. Dengan kata lain pluralisme mencoba membuka ruang baru bagi agama, yakni ruang rela. Pluralisme dapat membangkitkan sebuah kesadaran profetik mengenai pentingnya menajamkan kearifan hidup bahwa semua yang ada di bumi merupakan saudara.<sup>5</sup>

Selain itu, dalam keyakinan orang Jawa dikenal dengan *manunggaling kawula gusti*. Merupakan sebuah konsep kebatinan tertinggi dari orang Jawa, yang mana mencapai derajat atau tingkatan tersebut adalah lebih utama dibandingkan amali-amali yang bersifat ragawi, meski *laku-laku* atau tindakan-tindakan tersebut juga penting, tetapi orang Jawa juga memiliki keyakinan *urip mung mampir ngombe* (hidup di dunia ini hanyalah sebuah kefanaan atau bukan realitas yang sebenarnya).<sup>6</sup> Dari prinsip-prinsip orang Jawa tersebut, maka dalam masyarakat Jawa dalam satu keluarga berbeda keyakinan adalah sebuah hal yang biasa, dan lebih mengutamakan menjaga

---

<sup>3</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk pluralisme* (Jakarta: PT. Grasindo, 20100) ,10.

<sup>4</sup>Ibid., 12.

<sup>5</sup>Moh. Yamin dan Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi* (Malang: Madani Media, 2011),19.

<sup>6</sup>budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawaen* (Yogyakarta: Eulo Book, 2009), 63-64.

keharmonisan dibandingkan membenarkan (mencari-cari pembenaran) dari keyakinan yang ia anut.<sup>7</sup>

Pluralisme juga dapat didefinisikan sebagai bentuk hubungan yang damai antar agama-agama yang berkembang di suatu wilayah tertentu. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menunjuk pada beberapa pengertian lain, diantaranya:<sup>8</sup>

1. Pluralisme dapat digunakan untuk mendeskripsikan cara pandang bahwa agama yang dianut seseorang bukan merupakan satu-satunya kebenaran dan sumber kebenaran.
2. Pluralisme sering dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan persatuan, kerjasama, dan meningkatkan saling pengertian di antara pemeluk berbagai agama yang berbeda.
3. Pluralisme dipandang sinonim dari toleransi yang merupakan syarat bagi terciptanya koeksistensi yang harmonis dan damai diantara berbagai aliran dalam sebuah agama.

Sedangkan menurut Dimiyati Huda, pluralisme adalah suatu pandangan filosofis yang tidak mau mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, tetapi menerima apa adanya keragaman. Pluralisme meliputi bidang kultural, politik, dan agama. Terhadap pengertian yang bias dengan relativisme ini, tentu orang yang beragama tidak dapat menerima sepenuhnya. Oleh karena

---

<sup>7</sup>Moh. Roqib, *Hormat Dalam Budaya Jawa* (Purwokerto: Stain Purwokerto Press, 2007), 227.

<sup>8</sup>Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 173.

itu, pemahaman yang berbeda terhadap ide pluralisme akan selalu terjadi dikalangan tokoh-tokoh agama.<sup>9</sup>

Bagi Nurcholish Madjid dalam bukunya, yang berjudul *Islam Agama Kemanusiaan: membangun Tradisi dan Visi Baru Islam di Indonesia*, pluralisme agama bisa dipahami dalam minimum tiga kategori. *Pertama*, kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti “semua agama berhak untuk ada dan hidup”. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lainnya. *Kedua*, kategori etika atau moral. Dalam hal ini pluralisme agama berarti “semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah”. Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang memiliki pandangan moral berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, hukuman gantung, euthanasia. *Ketiga*, kategori teologi-filosofi. Secara sederhana berarti “agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan”. Mungkin kalimat yang lebih umum adalah “banyak jalan menuju Roma”. Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

Alwi Shihab memberikan beberapa pengertian dan catatan mengenai pluralisme sebagai berikut: *pertama*, pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan adanya kemajemukan, tetapi juga keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, dengan pluralisme tiap

---

<sup>9</sup>Dimiyati Huda, *Pluralisme Dalam Beragama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 20.

<sup>10</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 121.

pemeluk agama tidak hanya dituntut mengakui keberadaan hak agama lain tetapi ikut terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dan kebinekaan. *Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas, yang di dalamnya berbagai ragam agama, ras, dan bangsa, hidup secara berdampingan di sebuah lokasi. *Ketiga*, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berfikir seseorang atau masyarakatnya. *Keempat*, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yaitu menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu dari berbagai ajaran agama.<sup>11</sup>

Realitas itu majemuk dan tak terbatas. Tidak ada dua hal yang ada di dunia ini yang sama persis (kembar identik). Sama halnya dengan keyakinan dan agama yang dianut manusia. Agama merupakan hal yang paling prinsip bagi kehidupan manusia, sehingga banyaknya agama adalah sebanyak manusia itu sendiri. Akan tetapi, jika agama itu dilembagakan dalam bentuk komunitas, tentu tidak akan sebanyak jumlah manusia yang ada. Sebagaimana perkataan Paulus II yang dikutip oleh Syafa'atun Elmirzanah, sebagai berikut: "Agama itu banyak dan bermacam-macam. Semuanya merefleksikan keinginan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan sepanjang abad untuk masuk dalam perjumpaan dengan Wujud yang Absolut (Tuhan).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Dimiyati Huda, *Pluralisme Dalam Beragama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 21,22.

<sup>12</sup>Syafa'atun Elmirzanah, et.al., *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 107.

Fenomena pluralisme ini dapat muncul karena beberapa hal yang melatarbelakangi, diantaranya: *pertama*, ketika Tuhan mewahyukan dan menampakkan dirinya, hal ini dilakukan dalam konteks, situasi historis, serta bahasa dan budaya tertentu. *Kedua*, komunitas manusia akan menerima dan menginterpretasikan dan mengekspresikan wahyu tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang menjadi akar budayanya. *Ketiga*, wahyu tersebut memerlukan interpretasi secara terus menerus menurut situasi historis dan konteks yang berbeda-beda serta berubah-ubah. Dan yang *keempat*, merupakan sumber terdalam dari adanya pluralisme ini adalah merupakan kehendak Tuhan sendiri dalam mengomunikasikan dengan banyak cara. Barangkali dapat dikatakan bahwa agama adalah keanekaragamannya jalan untuk menuju kepada satu titik yang sama, “Tuhan”.<sup>13</sup>

Pluralisme mengandaikan sebuah kehidupan yang berbasiskan pengakuan diri di antara sesama bahwa yang berbeda hanyalah permukaan sedangkan yang dituju adalah sama untuk kebaikan bersama. Pluralisme menghendaki sebuah proses pelaksanaan hidup yang tegak berdiri diatas humanisme yang meneriakkan anti penindasan, anti diskriminasi dan lain sejenisnya. Pasalnya, hidup dan kehidupan adalah bersama menuju sebuah kebaikan.<sup>14</sup> Dalam konteks relasi masyarakat yang kompleks, pluralisme merupakan kunci penting guna memahami realitas kehidupan. Realitas kehidupan merupakan hasil konstruksi, karena itu tidak mungkin ada realitas tunggal akan tetapi plural. Sehingga dalam pluralitas tersebut akan muncul

---

<sup>13</sup>Ibid., 109.

<sup>14</sup>Moh. Yamin dan Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi* (Madani Media: Malang 2011),16.

banyak perbedaan baik pandangan, pemikiran dan lain sebagainya. Sangat mustahil keseragaman akan terjadi sebab setiap individu dan kelompok sosial mempunyai konstruksi sosial yang berlainan.<sup>15</sup>

## **B. Sejarah Pluralisme Agama**

### **a. Pluralisme Agama di Asia**

Pluralisme agama, untuk sebagian telah berkembang di anak benua India sejak kelahiran agama Hindu Veda sekitar 2500 SM, diikuti bangkitnya agama Budha sekitar 500 SM dan berikutnya pada masa kekuasaan kesultanan Islam (Kesultanan Delhi 1276-1526) dan kekuasaan Imperium Mughal 1526-1857. Pada abad ke-8, Zoroastrianisme mulai menanamkan pengaruhnya di India ketika para penganut agama ini melarikan diri dari tanah kelahiran mereka di Persia ke India dalam jumlah yang besar, untuk mencari perlindungan. Fase kolonial Inggris berlangsung hingga tahun 1947 dan mengakibatkan perpindahan agama pada kalangan kasta rendah menjadi Kristen. Pada tahun 1948 sebanyak 20.000 penganut Yahudi tinggal di India, meskipun kebanyakan dari mereka sudah pindah ke Israel. Meskipun di Jepang Budhisme dan Shinto dapat hidup berdampingan selama berabad-abad, kedatangan agama Kristen ke negeri tersebut yang dibawa oleh Francis Xavier telah mengakibatkan penyiksaan pada penganut Kristen selama ratusan tahun

---

<sup>15</sup>Ibid., 17.

sampai masa kekuasaan Meiji, sebab penguasa Jepang memandang kedatangan agama Kristen sebagai ancaman.<sup>16</sup>

#### **b. Pluralisme Agama di Dunia Islam**

Pluralisme agama berkembang di dunia Islam pada abad tengah dalam sistem hukum dan etika Islam, pada saat dimana sistem peradilan bagi penganut agama di luar Islam, termasuk Kristen, yahudi dan Hindu, diberi peluang untuk tetap berkembang dalam kerangka sistem hukum Islam, seperti yang terdapat dalam masa kekuasaan umat Islam di Andalusia dan Imperium Usmani di Turki dan anak benua India.

Secara teoritis Islam tidak memandang dirinya sebagai satu-satunya jalan kebenaran dalam mengikuti kehendak Tuhan dan cara memperoleh surga. Islam memandang agama monoteis terdahulu yakni yahudi dan Kristen dalam bentuknya yang asli merupakan agama yang sah. Umat Islam juga mengakui keabsahan kitab-kitab suci sebelum al-Quran, termasuk Taurat dan Injil.

Melengkapi uraian tentang pluralisme agama dalam perspektif Islam, salah satu tokoh yang mengembangkan wacana pluralisme agama di Indonesia adalah Nurcholish Madjid, ia telah memberikan landasan yang cukup komprehensif tentang pluralisme agama dalam konteks menempatkan Islam sebagai agama yang dapat menerima pluralisme.

---

<sup>16</sup>Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 179.



Nurcholish Madjid juga memberikan contoh sejarah masa lalu umat Islam bagaimana pluralisme telah dipraktikkan dalam kehidupan berbudaya dan politik. Antara lain “Piagam Madinah” yang telah memberi contoh penerapan pluralisme secara kongkret. Piagam tersebut secara jelas telah menjadi landasan bagi terbentuknya sebuah konfederasi dari berbagai elemen masyarakat di Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, termasuk komunitas muhajirin, kaum migrant dari Mekkah.<sup>17</sup>

### **c. Pluralisme Agama di Eropa**

Imperium Romawi Kuno yang mengakui adanya banyak Tuhan memandang agama tradisional Roma sebagai salah satu pilar utama bagi negara republik Roma. Mereka menilai bahwa kebijakan Romawi sebagai faktor pengikat yang amat penting bagi imperium yang multietnis tersebut. Sebagai negara dengan keyakinan akan adanya banyak Tuhan (politeis) bahwa Romawi tidak keberatan jika bangsa-bangsa yang ditaklukkannya terus melanjutkan menyembah Tuhan-tuhan tradisional mereka, sejauh mereka juga mau mengakui Tuhan bangsa Romawi. Ketidak patuhan dalam menunjukkan pengakuan mereka pada Tuhan-tuhan Romawi bisa dianggap sebagai suatu pembangkangan terhadap kekuasaan Roma dan dipandang sebagai pemberontakan politik terhadap penguasa Romawi.<sup>18</sup>

### **d. Pluralisme pada Abad Pertengahan**

Setelah kekaisaran Romawi di Barat hancur, penduduk di Eropa Barat terus bertambah, merupakan percampuran yang bermacam-macam

---

<sup>17</sup>Ibid., 183.

<sup>18</sup>Saleh, *Kajian Filasafat.*, 189.

dari bangsa Latin, rakyat Jerman yang telah terserap ke dalam imperium dan menjadi bagian dari rakyatnya selama berabad-abad, dan sejumlah suku-suku Jerman yang baru pindah ke wilayah Eropa Barat. Pada masing-masing kelompok ini terdapat penganut Kristen, Pagan, dan sebagian penganut kepercayaan lain. Dalam tradisi Jerman, para kepala suku juga bertindak sebagai pemuka agama, sehingga konversi kepala agama yang dilakukan oleh kepala suku ini (meskipun karena alasan politik semata) akan diikuti oleh proses kristenisasi seluruh anggota suku, sehingga kepala suku secara de facto menjadi pimpinan gereja Kristen. Cukup banyak terjadi paralelisme antara kepercayaan pagan dengan agama Kristen, tetapi toleransi dari agama-agama lama ataupun baru sangat tergantung pada pilihan pribadi dan para penguasa lokal.<sup>19</sup>

**e. Pluralisme pada Abad Pencerahan**

Pada paruh kedua abad ke-17, sebagian karena sudah terlalu payah akibat perang agama, sebagian lagi karena pengaruh semangat pencerahan tahap awal, beberapa negara mengadopsi sikap toleran terhadap kelompok keagamaan yang berbeda. Hal itu dapat dilihat, misalnya, pada perjanjian Westphalia 1653 atau *the Edict of Tolerance* di Inggris 1689. Kelompok Protestan dan para filosof yang berfikir bebas, seperti John Locke dan Thomas Paine, mendorong terwujudnya toleransi dan sikap moderat dalam beragama. Pandangan-pandangan mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat pada para pendiri negara Amerika dan pada rumusan konsep tentang

---

<sup>19</sup>Ibid., 190.

kebebasan beragama yang modern dan persamaan hak yang mendasari pluralisme agama di Amerika Serikat.<sup>20</sup>

#### **f. Pluralisme Agama di Indonesia**

Sebaik apa pun rumusan tentang pluralisme agama dan sekuat apapun argumen yang disusun untuk membenarkannya, masih banyak orang yang belum bisa menerima konsep tentang pluralisme agama ini. Di Indonesia, khususnya di luar dunia akademik, masalah pluralisme agama masih banyak ditentang oleh para ulama' dan kalangan yang oleh John Hick dikategorikan sebagai the exclusivists.<sup>21</sup>

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang paling Plural di dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Serta dengan latar belakang yang paling beraneka ragam, yaitu dengan sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya. Indonesia juga sebuah negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Kenyataan itu, menjadikan setiap orang Indonesia berada dalam pluralitas tersebut. Namun dengan adanya pluralitas tersebut tidak dapat terhindar dari adanya konflik.

Fatwa bahwa Islam memperkuat toleransi dan memberikan apresiasi terhadap pluralisme agama, sangat kohesif dengan nilai-nilai Pancasila sejak semula mencerminkan tekad berbagai golongan dan agama untuk bertemu dalam titik kesamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang panjang dalam pergumulan tentang

---

<sup>20</sup>Ibid., 191.

<sup>21</sup>Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 212

keragaman aliran politik dan keagamaan, sejak zaman pra kemerdekaan sampai dengan sesudahnya. Pancasila adalah yang telah memberi kerangka dasar bagi masyarakat Indonesia dalam masalah pluralisme keagamaan.<sup>22</sup>

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuah hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme adalah dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Dalam sebuah masyarakat otoriter atau oligarkis, ada konsentrasi kekuasaan politik dan keputusan dibuat oleh hanya sedikit anggota. Sebaliknya, dalam masyarakat pluralitas, kekuasaan dan penentuan keputusan (dan kemilikan kekuasaan) lebih besar.

Dalam konteks Indonesia, pikiran yang menganggap semua agama itu sama sebenarnya telah lama masuk ke Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya. Tapi akhir-akhir ini, pikiran itu menjelma menjadi sebuah paham dan gerakan “baru” yang kehadirannya serasa begitu mendadak, tiba-tiba dan mengejutkan. Umat Islam seperti mendapatkan pekerjaan rumah yang baru dari luar rumahnya sendiri. Padahal umat Islam dari sejak dulu hingga kini telah biasa hidup ditengah ke-bhineka-an atau pluralitas. Dalam Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama’ Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa

---

<sup>22</sup>Dimiyati Huda, *Pluralisme Dalam Beragama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 26.

sebanyak itu. Selain fatwa tersebut mengharamkan pluralisme, MUI juga mengharapkan faham kontemporer lainnya yaitu sekulerisme dan liberalisme. Secara lengkap, ketentuan hukum yang tercantum dalam fatwa MUI No: 7/MUNAS/VII/MUI/II/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekulerisme agama adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pluralisme, sekulerisme dan liberalism agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme dan liberalism agama.
3. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersifat inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, menggambarkan bahwa wacana pluralisme agama menjadi sebuah kajian yang dihujat dan dipuja. Ada kelompok yang pro-pluralisme agama, dan ada juga kelompok yang kontra terhadap pluralisme agama.

---

<sup>23</sup>Subkhan, Imam, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, (Yogyakarta: Kanisius 2007), 13.

### C. Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Siapa sangka tokoh *nyeleneh* dari pesantren ini kelak menjadi seorang pemimpin bangsa yang mampu mengguncangkan negeri. Sikapnya yang tidak bisa diprediksi, *nyeleneh*, berani dan melawan arus ini memang diimbangi dengan intelektualitasnya yang mumpuni. Tindakan-tindakannya yang kontroversi tanpa rasa takut dan seolah diluar pertimbangan itu, ternyata telah menggoyahkan berbagai macam tatanan kepentingan kaum Orde Baru warisan Soeharto. Sosok tulen yang besar di pesantren ini memang ingin membersihkan sisa-sisa kroni Orba pada masa kepemimpinannya di era reformasi.<sup>24</sup>

Tokoh *nyeleneh* tersebut tiada lain adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur. Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940. Di Denanyar, Jombang, Jawa timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban, sama dengan 7 September 1940.<sup>25</sup>

Silsilah keluarga Gus Dur memang tak main-main, karena ia termasuk keturunan para tokoh pembesar, kiai sekaligus para penyebar Islam di tanah Jawa.<sup>26</sup> Kedua kakek Gus Dur, Kiai Bisri Syansuri dan Kiai Hasyim Asy'ari, sangat dihormati di kalangan NU, baik oleh karena peran mereka dalam

---

<sup>24</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 12.

<sup>25</sup>Ibid., 12.

<sup>26</sup>Ng. Al-zastrow, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan?* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999), 13.

mendirikan NU maupun oleh karena pengaruh mereka sebagai ulama. Berlawanan dengan yang biasa terjadi dengan kaum ulama tradisional, Kiai Hasyim Asy'ari, dan terlebih lagi puteranya, Kiai Wahid Hasyim, yang menjadi menteri agama dalam pemerintahan Soekarno, juga dihormati oleh masyarakat menengah kota oleh karena kedekatan mereka dengan gerakan nasionalis yang memimpin perjuangan yang revolusioner melawan penjajah Belanda setelah akhir Perang Dunia II. Oleh karena itu, kedua orang tersebut secara resmi dikenang sebagai Pahlawan Nasional.<sup>27</sup>

Pada tahun 1949, ketika *Clash* dengan pemerintah kolonial Belanda berakhir, dan ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama yang pertama, keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi pendidikan formalnya, Gus Dur dikirim ayahnya untuk mengikuti les privat bahasa Belanda. Gus Dur menempuh pendidikan ini dengan naik sepeda. Guru lesnya bernama Willem Buhl, seorang Jerman yang telah masuk Islam dan mengganti namanya dengan Iskandar. Untuk menambah pelajaran bahasa Belanda, Buhl selalu menyajikan musik klasik Barat yang biasa dinikmati oleh orang dewasa. Inilah pertama kali persentuhan Gus Dur dengan budaya Barat.<sup>28</sup>

Menjelang kelulusannya di sekolah dasar Gus Dur memenangkan perlombaan karya tulis dan menerima hadiah dari pemerintah. Selanjutnya pada April tahun 1953, beberapa bulan sebelum kelulusan, dia pergi bersama

---

<sup>27</sup>Greg Barton, *Gus Dur: Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. (Yogyakarta: LKiS, 2008). 26.

<sup>28</sup>Greg Barton, *Gus Dur: Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. Hal 13-14.

ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Disuatu tempat disepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobil yang dikendarai mengalami kecelakaan. Gus Dur kecil bisa diselamatkan, tetapi ayahnya meninggal. Kematian Wahid Hasyim merupakan pukulan berat bagi keluarganya. Istrinya, ibu Gus Dur, Ny. Sholehah pada saat itu sedang mengandung tiga bulan dan menanggung beban lima orang anak. Ketika pelayat resmi telah pergi dan para kiai telah usai dengan rasa duka mereka dan masa berkabung nasional berakhir, Solichah, ketika itu berusia 29 tahun, harus mengurus keluarganya seorang diri. Ia juga harus membayar ongkos perawatan rumah yang besar di Mataram, yang dibeli ketika almarhum suaminya masih menjadi seorang menteri. Untuk dapat tetap tinggal di rumah ini ia harus bekerja keras.<sup>29</sup>

Dalam waktu yang pendek, Gus Dur tidak terlihat sebagai siswa yang cemerlang. Pada tahun 1954, setelah ia menamatkan Sekolah Dasar dan mulai sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP), ia terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Sekarang ini, ketika ditanya bagaimana kematian sang ayah mempengaruhi dirinya, Gus Dur menolak antara ada hubungan antara kinerjanya yang buruk di sekolah pada tahun berikutnya dan usahanya yang keras untuk dapat menerima kehilangan seorang ayah. Ia hanya berkata bahwa ia malas dan lebih tertarik menonton sepakbola dan menonton film sehingga ia gagal dalam pelajaran. Sebagai seorang dewasa, ia jarang mengakui dirinya pernah mengalami keraguan atau depresi. Namun demikian,

---

<sup>29</sup>Ibid., 43



ada tanda-tanda bahwa kematian sang ayah, yang lebih dekat terhadapnya daripada terhadap saudara-saudaranya, merupakan pukulan yang hebat. Walaupun ia selalu menggambarkan ayahnya sebagaimana adanya, ia selalu sangat menyayangi dan mengagumi sang ayah.<sup>30</sup>

Pada tahun 1954, sementara sang ibu berjuang sendirian untuk membesarkan enam anak, sedangkan Gus Dur sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya. Ia dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkannya ke SMP. Ketika di kota ini, ia berdiam di rumah salah seorang teman ayahnya, Kiai Haji Junaidi. Yang menarik bahwa kiai Junaidi adalah salah seorang dari sejumlah kecil ulama yang terlibat dalam gerakan Muhammadiyah pada periode ini.<sup>31</sup>

Untuk melengkapi pendidikan Gus Dur maka diaturlah agar ia dapat pergi ke Pesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Pesantren ini terletak sedikit di luar Yogyakarta. Di sini ia belajar bahasa Arab dengan Kiai Haji Ali Ma'sum. Ketika tamat Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada tahun 1957, Gus Dur mulai mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan Pesantren Tegalrejo di Magelang, yang terletak di sebelah utara Yogyakarta dan dapat di capai dengan mobil dalam satu jam.<sup>32</sup> Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). pada tahun 1959, ia pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, ia juga menerima pekerjaan

---

<sup>30</sup>Ibid., 44.

<sup>31</sup>Ibid., 47.

<sup>32</sup>Ibid., 49.

pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti *Horizon* dan *Majalah Budaya Jaya*.<sup>33</sup>

Karier pendidikan Gus Dur pun berlanjut. Kali ini, ia menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 1963. Bulan November, ia berangkat ke Mesir, sebagai seorang pesantren tulen, Gus Dur jago dalam berbahasa Arab yang juga menjadi bekal utamanya. Namun, meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur di beritahu oleh pihak Universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Gus Dur pun terpaksa mengambil kelas remedial.<sup>34</sup> Sebagai reaksinya, Gus Dur tidak mengikuti kelas itu. Diingatnya bahwa oleh karena sepanjang tahun 1964 ia hampir tidak masuk kelas pemula itu, ia juga artinya tidak mengikuti studi formal. Sebaliknya ia malah menyalurkan hobinya mengikuti pertandingan sepakbola yang banyak terdapat di Kairo, membaca di perpustakaan-perpustakaan yang besar, menonton film-film Prancis, dan ikut serta dalam diskusi-diskusi di kedai-kedai kopi yang sangat menarik. Bila Al-Azhar merupakan kekecewaan bagi Gus Dur, Kairo sebaliknya, sangatlah menyenangkan. Kota ini adalah kota besar pertama yang di kunjunginya dan ia pun terpesona olehnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 15.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 15.

<sup>35</sup>Greg Barton, *Gus Dur: Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. (Yogyakarta: LKiS, 2008). 84.

Ketika berada di Kairo , Gus Dur berusia dua puluh lima dan ia merasa bebas. Sebagai remaja di Yogyakarta, kehidupannya relatif bebas tetapi sebagai putera tertua almarhum Kiai Wahid Hasyim, setiap gerakannya diamati, termasuk kunjungannya ke bioskop secara diam-diam. Sebagai seorang siswa pesantren di Magelang dan Jombang, ia merasakan adanya batasan sosial yang bahkan lebih ketat. Walaupun Al-Azhar cukup mengecewakan baginya, secara aneh tempat itu merupakan pengalaman yang membebaskannya oleh karena itu ia dapat memperoleh kebebasan untuk menghabiskan waktunya dengan caranya sendiri. Ia tidak di halangi oleh jadwal yang ketat atau oleh orang-orang yang mengawasinya di kota-kota kecil di Jawa.<sup>36</sup>

Di Mesir, Gus Dur di pekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa gerakan Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis di lakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Gus Dur, yang ditugaskan menulis laporan. Di sisi lain, Gus Dur mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas

---

<sup>36</sup>Ibid., 85.

Baghdad. Ia pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, namun Gus Dur dengan cepat belajar dari kesalahan-kesalahannya. Ia pun meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.<sup>37</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Gus Dur berharap dapat mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Eropa. Dia melakukan perjalanan untuk melakukan peninjauan. Dia mengunjungi Universitas Kohn, Heidelberg, Paris, dan Leiden. Untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut, dibutuhkan persyaratan bahasa yang ketat yang tidak dapat dipenuhi tanpa menempuh pelajaran tambahan selama satu tahun. misalnya untuk masuk dalam Kajian Klasik di Kohn, harus memenuhi standart tidak hanya bisa berbahasa Jerman, tapi juga bahasa Hebrew, Yunani atau Latin secara baik. Karenanya Gus Dur menjadi pelajar keliling, berjalan dari universitas ke universitas lain. Setengah bulan disini, setengah bulan berikutnya di sana. Akhirnya dia menetap di Belanda, dia tinggal selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di eropa. Organisasi ini sampai sekarang masih hidup. Untuk biaya hidup selama di rantau, dua kali sebulan dia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker.<sup>38</sup>Kecewa di Belanda membuat Gus Dur pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Ketika kembali ke Jakarta, Gus Dur berkeinginan kembali ke luar negeri lagi, namun keinginannya adalah studi di Universitas McGill Kanada. Oleh karena

---

<sup>37</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 16.

<sup>38</sup>Ng. Al-zastrouw, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan?* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999), 27.

itu Gus Dur mulai melakukan kesibukan organisasi dan ilmiah. Di antaranya, bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut *Prisma* dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut.<sup>39</sup>

Pertama kali datang di Indonesia, Gus Dur memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, dia bergabung di Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim Asy'ary, Jombang, sebuah perguruan tinggi Islam yang di dirikan pada tahun 1969. Di sini dia mengajar Teologi dan beberapa ilmu-ilmu agama lainnya. Kemudian pada tahun 1974 dia mulai menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng. Pada tahun yang sama Gus Dur mulai menulis di beberapa surat kabar, majalah dan jurnal. Dalam tulisan-tulisannya, Gus Dur mengembangkan gaya bahasa yang menggabungkan bahasa harian dan humor dengan topik-topik yang serius.<sup>40</sup> pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam artikelnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini membuat dirinya mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial dan mulai dikenal publik. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar diberbagai tempat. Kadang, ia harus bolak-balik Jakarta Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya, hanya untuk memberi kuliah atau seminar.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 17.

<sup>40</sup>Ng. Al-zastrouw, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan?* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999) , 28.

<sup>41</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 18.

Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gus Dur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut membuat Gus Dur memilih untuk membatalkan belajarnya di luar negeri dan memilih mengembangkan pesantren di dalam negeri.<sup>42</sup>

Sebagai putera sulung Kiai Wahid Hasyim dan cucu Kiai Bisri Syansuri, Gus Dur mendapat pengawasan ketat oleh kiai-kiai senior NU. Namun, naiknya kedudukan Gus Dur di NU tidaklah terjadi secara otomatis. Memang, karena keturunan, ia mempunyai kedudukan yang terhormat dan hal ini berarti bahwa orang berharap banyak dari dirinya. Namun ia harus membuktikan sendiri bahwa dirinya patut untuk mendapatkan kedudukan itu.<sup>43</sup>

Sebagai anak yang lahir dan besar dalam sejarah besar NU, Gus Dur mau tidak mau memiliki kewajiban moral untuk berperan aktif dalam organisasi bentukan sang kakek. Gus Dur diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus

---

<sup>42</sup>Ibid., 18.

<sup>43</sup>Greg Barton, *Gus Dur: Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. (Yogyakarta: LKiS, 2008). 115.

Dur dalam menjadi intelektual publik. Sehingga dua kali ia menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU. Namun, Gus Dur akhirnya luluh juga untuk bergabung dengan dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap disana.<sup>44</sup>Setelah pindah ke Jakarta karier Gus Dur mulai menanjak naik, mulai dari mengeluarkan gagasan-gagasannya yang cemerlang melalui media massa maupun ketika menjadi ketua PBNU dan kemudian menjadi Presiden RI ke empat.

#### **a. Membela Kaum Minoritas**

Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur. Sepanjang hidupnya, ia selalu berjuang untuk membela hak-hak kelompok minoritas dalam kesetaraan di depan hukum. Ia juga selalu berupaya mewujudkan perdamaian demi menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara-cara yang benar. Bagi tokoh yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di daerah Denanyar itu, semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Mereka harus dijauhkan dari diskriminasi. Gus Dur tak pernah ragu untuk membela warga negara yang hak-hak konstitusionalnya diganggu. Seperti pembelaan terhadap kelompok minoritas etnis Tionghoa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 19.

<sup>45</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 135-136.

Pembelaan Gus Dur pada kelompok keturunan Tionghoa, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan (seperti PP. No. 6 th 2000 dan pengumuman libur nasional Imlek), sikap pergaulan (seperti dialog dan kunjungan-kunjungan) maupun dalam bentuk kerjasama bisnis (seperti kerjasama pendirian Bank NUSUMA) merupakan pengakuan Gus Dur atas keberadaan kelompok keturunan Tionghoa sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kelompok keturunan tionghoa dalam wawasan kebangsaan bagi Gus Dur adalah sama dengan suku-etnis bangsa yang lain, seperti etnis-suku Jawa, Batak, Papua, Arab, India, Jepang dan Eropa, yang sudah lama hidup dan menjadi bagian dari penduduk dan warga negara Indonesia. Orang-orang dari kelompok keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia yang lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan perlakuan sama sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>46</sup>

Sejak itu, berbagai ekspresi kebudayaan dan tradisi, tidak saja dalam konteks Tionghoa, dapat diselenggarakan secara merdeka. Perayaan budaya ‘Seren Tahun’ masyarakat Karuhan Sunda di Cigugur, Kuningan, pun akhirnya juga dapat terselenggara setelah berdasawarsa mengalami pelarangan. Keputusan politik Gus Dur tersebut juga membuka ruang dan inisiatif pembaharuan berbagai peraturan yang diskriminatif dalam bidang kewarganegaraan, catatan sipil, dan anti diskriminasi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>MN. Ibad dan Akhmad Fikri AF, *Bapak Tionghoa Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 20112), 83.

<sup>47</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 136.



Sejak masa reformasi, terlebih lagi sejak era kepresidenan Gus Dur, keturunan tionghoa mulai mendapatkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan keberagamaan mereka, menjaga dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya mereka, bahkan juga ikut ambil bagian dalam wilayah politik praktis Indonesia. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru dan masa sebelumnya, hanya orang keturunan Arab saja yang bisa duduk dalam kabinet. Dalam wilayah politik praktis ini, kelompok keturunan Tionghoa ada yang bergabung untuk mendirikan partai politik sendiri dan sebagian besar bergabung dengan berbagai partai politik yang lain.<sup>48</sup>

Menurut Masdudi, Gus Dur melakukan itu setidaknya ada beberapa alasan. *Pertama*, sisi perjuangan kewarganegaraan. Seperti diuraikan diatas, perjuangan Gus Dur dalam penghapusan diskriminasi yang dilakukan pada etnis Tionghoa untuk mendapatkan persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sosial. *Kedua*, sisi pengakuan keyakinan dan tradisi. Melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000 pulalah, agama dan etnis Tionghoa mendapat pengakuan sebagai bagian dari agama dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Di mana saat sebelum kepemimpinan Gus Dur, terutama masa Orde Baru, etnis Tionghoa mengalami “kegalauan batin” karena mereka dilarang menganut agama Konghuchu yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka dan secara terpaksa etnis Tionghoa memeluk agama lain

---

<sup>48</sup>MN. Ibad dan Akhmad Fikri AF, *Bapak Tionghoa Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 20112), 84.

yang diakui negara. Selain itu, kebudayaan etnis Tionghoa seperti Lion ataupun Barongsai semakin marak dilakukan diberbagai tempat, hingga menyentuh pedesaan. Hal tersebut semakin memperjelas jasa Gus Dur terhadap etnis Tionghoa dengan diakuinya budaya etnis Tionghoa sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. *Ketiga*, sisi keteladanan pergaulan. Sebagai tokoh organisasi Islam terbesar, yakni NU, Gus Dur dikenal begitu dekat dengan kelompok etnis Tionghoa. Baik mereka (kelompok keturunan Tionghoa) yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Sebagai figur umat Islam atau tokoh bangsa, Gus Dur menjalin hubungan dekat dengan kelompok etnis Tionghoa, sesuatu yang aneh di masa Orde lama dan Orde Baru. Secara tegas, Gus Dur menggambarkan bahwa kedekatan yang harmonis dengan siapapun, termasuk etnis Tionghoa akan menghasilkan kedamaian dan kemajuan yang bisa dinikmati bersama.<sup>49</sup>

Gus Dur mengakui bahwa keturunan Tionghoa memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan Indonesia dari masa raja sampai masa kemerdekaan, dan memiliki peran yang mengakar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Begitu besarnya pengakuan Gus Dur tersebut, sehingga ia membuat pernyataan yang cukup kontroversial bahwa para Walisongo adalah keturunan Tionghoa dan ia sendiri adalah keturunan Tan Kim Han. Tan Kim Han menurut Gus Dur menikah dengan Tan A Lok yang merupakan saudara kandung Raden Pattah (Tan Eng

---

<sup>49</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 137-138.

Hwa), dan keduanya adalah anak Putri Campa (putri Tiongkok) yang merupakan selir dari Raden Brawijaya V. Tan Kim Han ini dalam tradisi Islam dikenal sebagai Syaikh Abdul Qodir ash-Shini yang makamnya terdapat di Trowulan Mojokerto di samping makam Syaikh Jumadil Qubro. Terlepas dari benar atau tidaknya Gus Dur dengan pengakuannya tersebut, setidaknya Gus Dur sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa pada keberadaan kelompok keturunan Tionghoa dan bahkan bangga menjadi bagian dari kelompok keturunan Tionghoa.<sup>50</sup>

Ada sebuah cerita, bahwa pada 1492 terjadi pembalikan sejarah dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Disekitar tahun itu juga terjadi perkembangan lain yang membalik jalannya sejarah. Ketika itu seorang menteri pertahanan Confonsius pengikut Kong Hu Cu yang fanatik menjadi wali kaisar yang masih kecil. Dia melihat dari sudut pemahaman dia suatu perkembangan yang sangat mengkhawatirkan: kaum Cina rantau di Asia Tenggara yang beragama Islam sangat maju dalam membuat komunitas-komunitas kaya diseberang lautan. Menurut jalan pikiran dia, kalau mereka dibiarkan memupuk kekayaan seperti itu, lalu pulang dan membeli tanah-tanah di Cina, maka dalam waktu singkat Cina akan di Islamkan. Kong Hu Cu hilang sebagai agama dan Islam menggantikannya. Karena itu tindakan pertama yang dia ambil ketika menjadi wali kerajaan adalah menarik mundur semua jung-jung Cina yang ada di Asia Tenggara sampai ke Asia Timur dan pantai barat India untuk

---

<sup>50</sup>MN. Ibad dan Akhmad Fikri AF, *Bapak Tionghoa Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 20112), 86.

dibakar. Sementara itu komunitas Cina yang ada dibiarkan terserap oleh komunitas pribumi yang ada di Asia Tenggara.<sup>51</sup>

Inilah kenyataan sejumlah yang tidak bisa dibantah bahwa di Asia Tenggara komunitas Cina adalah komunitas Islam. Mau Chen Hok itu salah satu bukti sebagai laksamana yang membawa armada Cina pada ekspedisi ke-7. Dalam catatan sejarah ia membawa 28 ribu serdadu, memimpin pasukan tentara regular Cina (Korp Marinir zaman sekarang), yang ditempatkan diluar negeri dan mengamankan kepentingan Cina serta ikut menggulingkan kerajaan Majapahit bersama-sama orang Islam karena merasa satu agama.<sup>52</sup>

Pendeknya komunitas Cina 500 tahun yang lalu itu beragama Islam, kemudian ditarik ke Cina, lalu putus kontrak, akhirnya orang Cina yang muslim di Asia Tenggara terisolasi, dan diserap menjadi masyarakat pribumi sehingga hilang Cinanya. Baru 2 abad berikutnya orang Cina didatangkan oleh Belanda untuk bekerja di sini (untuk kepentingan Belanda). Mereka bekerja di perkebunan, atau pertambangan di Bangka, pertanian di Kalimantan Barat, pedagang di Jawa. Cina yang gelombang kedua inilah yang beragama Kong Hu Cu dan Buddha. Tentu ini agak mencanangkan. Sebab asumsi kita selama ini ialah bahwa orang-orang Cina di Indonesia semuanya beragama Buddha dan Kong Hu Cu. Di sini memang terjadi semacam pergantian agama dikalangan orang-orang Cina, bukan karena konversi, akan tetapi karena yang datang belakangan adalah

---

<sup>51</sup>Komaruddin Hidayat dan Ahmad Agus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 167.

<sup>52</sup>*Ibid.*, 168.

gelombang lain. Kalau yang satunya datang dari daerah-daerah Muslim Sin Chiang, maka yang belakangan datangnya dari Hokian. Jadi asal-usulnya memang sudah beda.<sup>53</sup>

Masih segar dalam ingatan tentang cara Gus Dur berjuang membela etnis Tionghoa pada 1998. Langkah yang diambil Gus Dur memang dianggap sulit diterima, bahkan bertentangan dengan pendapat umum yang menimpalkan kesalahan kepada orang-orang Tionghoa sebagai penyebab krisis ekonomi waktu itu. Beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, Gus Dur (yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama-PBNU) menyerukan kepada keturunan Tiongkok yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. Kepada warga pribumi, Gus Dur mengimbau agar mau menerima dan membaur dengan warga keturunan Tionghoa tersebut.

Puncaknya saat Gus Dur menjadi presiden. Hari Raya Imlek diperingati dan dirayakan dengan bebas. Warga Tionghoa tidak perlu sembunyi-sembunyi jika merayakannya. Kebebasan ini tak lepas dari keputusan politik Gus Dur yang pada 17 Januari 2000 mengeluarkan Intruksi presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2000. Isinya adalah mencabut Inpres No. 14/1967 rezim Orde Baru yang represif telah membuat Imlek terlarang dirayakan di depan publik, barongsai, liang-liong harus sembunyi, dan huruf-huruf atau lagu Mandarin tidak boleh diputar di

---

<sup>53</sup>Ibid., 168.

radio. Selama 32 tahun Orde Baru, tidak pernah ada Imlek yang meriah seperti tahun-tahun setelah Gus Dur menjadi presiden.<sup>54</sup>

Gus Dur juga mengumumkan bahwa Imlek menjadi hari libur opsional yang kemudian diperjuangkan menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Atas jasa itu pula, akhirnya pemerintah mengesahkan Konghuchu sebagai aliran kepercayaan di Indonesia. Dapat dimengerti bila masyarakat keturunan Tionghoa sangat gembira dan berterima kasih menyambut kebijakan Gus Dur tersebut.

Gus Dur melakukan banyak terobosan untuk mengangkat kaum minoritas. Misalnya, membolehkan perayaan Imlek yang selama masa Soeharto dilarang. Gus Dur juga sempat meminta agar TAP MPRS No.XXIX/MPR/1966 tentang pelanggaran marxisme leninisme dicabut. Hal ini cukup kontroversial mengingat bagaimanapun sepanjang era Soeharto, PKI (yang berkaitan dengan marxisme-leninisme) sudah dihentikan. Padahal, masyarakat Indonesia sudah terlanjur mengesahkan bahwa PKI termasuk dalam golongan tidak beragama (walaupun ada komunis-Islam), yang sulit diterima di Indonesia yang menjunjung tinggi “Ketuhanan yang Maha esa”. Dengan membuka keadilan untuk kaum minoritas, sebenarnya Gus Dur menunjukkan adanya persamaan derajat antarsesama warga negara Indonesia.<sup>55</sup> Gus Dur juga merupakan pemimpin tertinggi Indonesia pertama yang menyatakan permintaan maaf kepada

---

<sup>54</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 137.

<sup>55</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 118.

para keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI yang mati disiksa antara 500.000-800.000 jiwa) dalam gerakan pembersihan PKI oleh pemerintah Orde Baru. Gus Dur juga berhasil menghapus cap PKI pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal ini, ia memang tokoh pahlawan anti diskriminasi. Ia menjadi inspirator pemuka agama-agama untuk melihat kemajemukan suku, agama, dan ras di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang harus dipelihara dan disatukan sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang besar.<sup>56</sup>

Menurut Roy Salamony sedikitnya dapat diketahui tiga alasan objektif Gus Dur. *Pertama*, bahwa konsep-konsep marxisme telah dipeajari terbuka di lingkungan perguruan tinggi. *Kedua*, era komunis telah berakhir seiring berakhirnya negara Uni Soviet diujung babak perang dingin. *Ketiga*, dendam sejarah masa lalu harus disingkirkan demi menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan.<sup>57</sup>

Rooy juga mengatakan bahwa humanisme Gus Dur adalah alasan paling jelas mengapa ia melontarkan gagasan pencabutan TAP MPRS XXV/1966. Latar belakangnya sebagai mantan ketua umum Nahdlatul Ulama yang pernah menerima tekanan dan perlakuan buruk Orde Baru, serta posisinya selaku tokoh aktivis keagamaan dan hak asasi manusia merupakan faktor-faktor yang saling menjalin sebagai inti pelita hatinya

---

<sup>56</sup>M. Hamid, *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, ( Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mawar, 2010), 55.

<sup>57</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 119.

manakala ia menggagas ide pencabutan TAP MPRS XXV/1966 dari posisinya selaku presiden republik Indonesia.<sup>58</sup>

Hal yang sama ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, tidak sedikit orang yang menganggapnya aneh dan *nyeleneh* karena sering melontarkan statemen yang mengundang kontroversi. Gus Dur melakukan hal-hal atau suatu tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya. Selain mengeluarkan Inpres tahun 2000, ia juga menjadi pemimpin Indonesia pertama yang meletakkan fondasi bagi perdamaian di Aceh.<sup>59</sup>

Pada pemerintahan Gus Dur, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia menjadi terbuka. Padahal sebelumnya, pembicaraan tersebut merupakan sesuatu yang tabu sehingga peluang perdamaian ditutup rapat, apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan. Saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatannya untuk Aceh, Gus Dur tetap memilih menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpatik, yakni mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan secara rahasia Gus Dur mengirim Bondan Gunawan selaku pejabat sementara (Pjs) Menteri Sekretaris Negara, untuk menemui Panglima GAM, Abdullah Syafi'i, didalam Pidie.<sup>60</sup>

Memang, masalah konflik separatis selalu menjadi masalah yang sulit dipecahkan, terlebih lagi dalam masa peralihan dari pemerintahan

---

<sup>58</sup>Ibid., 120.

<sup>59</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 142.

<sup>60</sup>Ibid., 143.



otoriter yang didukung oleh tentara ke pemerintahan yang sepenuhnya demokratis. Walaupun Gus Dur menyatakan optimis dapat menyelesaikan masalah Aceh dengan cepat, ia sebenarnya tahu bahwa sedang memasuki suatu proses yang panjang dan lama. Prioritas utamanya adalah mencoba membujuk rakyat Aceh untuk menaruh kepercayaan kepadanya dan memberinya waktu.<sup>61</sup>

Meski Gus Dur belum bisa menjajikan kemerdekaan di Aceh, namun ada keputusan yang selalu di ingat sampai sekarang. Pada masa Gus Dur, Aceh diberikan kewenangan menerapkan syariat Islam dengan keluarnya UU No. 44 Tahun 1999. UU ini bukanlah secara khusus tentang syariat Islam, namun pemerintah mengakui secara legal keistimewaan Aceh dalam agama Islam sehingga dapat menerapkan Islam sebagai undang-undang kehidupan sosial mereka.<sup>62</sup>

Dalam menghadapi tuntutan mengenai diselenggarakannya suatu referendum dalam hitungan minggu, Gus Dur mencoba mengulur waktu. Dengan berbuat demikian, ia masuk ke dalam suatu pola sikap yang merugikan posisinya sebagai presiden. Sebagaimana telah dipelajari dan juga di praktikkan selama masa Soeharto, Gus Dur yang beralih menjadi presiden, mencoba berlari seperti petinju yang mendapat serangan. Sikap dan pernyataan-pernyataannya lebih di dorong oleh tuntutan sementara dari manuver taktik untuk dapat bertahan dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, ia berulang kali tidak bisa menjelaskan hal yang telah

---

<sup>61</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 143.

<sup>62</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 86.

dikerjakan. Ia mengelak dari masalah, dan sebaliknya menyatakan dukungannya untuk referendum.<sup>63</sup>

Dari rangkaian politik Gus Dur tersebut dapat kita pahami bagaimana strategi dan komunikasi yang dilakukan Gus dur dalam menyelesaikan masalah Aceh. Dinamika yang terjadi antara Gus Dur dan Aceh adalah sebuah dialektika demokrasi yang timbul karena “kedewasaan” Gus Dur dalam berpolitik dan “pengalaman” rakyat Aceh dalam membina hubungan dengan pemerintah Indonesia.<sup>64</sup>

Selain berperan besar dalam terciptanya perdamaian di Aceh, Gus Dur juga menjadi motor dalam usaha menyelesaikan konflik yang meletus di beberapa daerah. Ia menangani ancaman separatis yang semakin nyata, seperti gerakan separatis di Papua-Barat atau yang dulu dikenal dengan Irian Jaya. Menurut Gus Dur, jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan, kemungkinan besar akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Untuk menghadapi masalah tersebut, Gus Dur menyelesaikannya dengan cara damai. Gus Dur bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat di sana. Kedatangannya disambut demonstrasi yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan riuh menyuarakan tuntutan kemerdekaan. Sepanjang perjalanannya, demonstrasi berlanjut dalam berbagai bentuk.<sup>65</sup>

Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1999, saat berkunjung ke Irian Barat, Gus Dur serta merta menyetujui tuntutan kaum separatis Papua

---

<sup>63</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 144.

<sup>64</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 86.

<sup>65</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 145.

untuk mengubah nama “Irian” menjadi “Papua”. Malam itu, Gus Dur menjelaskan bahwa kata Irian berasal dari suatu kata Arab yang berarti “telanjang”, dan merupakan cara yang menyinggung perasaan bila digunakan untuk menyebut orang yang mendiami provinsi tersebut. Oleh karena itu, mereka dikenal dengan nama yang mereka pilih sendiri, Papua.<sup>66</sup>

Disisi lain, apa yang dilakukan oleh Gus Dur, merupakan diplomasi yang patut diacungi jempol. Keberaniannya menawarkan satu politik yang jitu, yakni, Papua boleh minta apa saja dan akan diberi, asal tidak meminta untuk merdeka dengan memisahkan diri dari NKRI. Langkah ini kemudian dibuktikan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan pada 1 Januari 2000, nama provinsi Papua kemudian dilegalkan melalui UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, dan sejak 10 November 2004, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 018/PUU-I/2003, area ini terdiri dari dua provinsi: Provinsi Papua Barat dan Papua yang terdiri dari 29 daerah pemerintahan dan dua kota praja. Selain itu, Gus Dur juga membentuk Kementerian Muda Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan mengangkat putra asli Papua, yaitu Manuel Kaisiepo sebagai menterinya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Ibid., 146.

<sup>67</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 90.

## **b. Penegakan Hak Asasi Manusia**

Pada saat Gus Dur menduduki kursi presiden, penuntasan kasus HAM menjadi isu yang selalu digulirkan. Sebagai negara demokratis, tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan, apalagi Gus Dur adalah orang yang demokratis, menjunjung tinggi kaum marginal dan sangat menghargai HAM. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diangkat untuk dituntaskan, salah satunya adalah pelanggaran HAM di Timor Timur yang belakangan menyeret jenderal besar di kabinet pemerintahan. Gus Dur memiliki ide untuk membuat pengadilan Ad Hoc HAM.<sup>68</sup>

Peran besar Gus Dur sebagai presiden dalam mendukung penuntasan kasus-kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia, Khususnya Timor Timur. Bentuk peran besar dukungan Gus Dur dalam menuntaskan masalah HAM di Timor Timur tersebut dibuktikan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia tanggal 23 November 2000. Undang- Undang ini menjadi dasar hukum bagi penuntasan kasus HAM yang terjadi di Indonesia, dimana salah satunya menjadi dasar didirikannya peradilan Ad Hoc HAM pada era Megawati selanjutnya.<sup>69</sup>

Kebijakan Gus Dur tersebut jelas mengusik para petinggi militer, terutama jenderal yang sedang duduk di kursi kabinetnya. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kasus pelanggaran HAM berat yang

---

<sup>68</sup>Ibid., 106.

<sup>69</sup>Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 110.

melibatkan perwira tinggi dan Polri, serta pemimpin sipil diajukan ke pengadilan (yang juga pertama di Indonesia), yaitu Pengadilan HAM Ad Hoc. Semuanya bermula dari keberanian Gus Dur dalam mendukung penuntasan kasus HAM dengan diterbitkannya UU tentang pengadilan HAM.<sup>70</sup>

Menurut Gus Dur dalam buku *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Untuk berterus-terang, masalah-masalah hak-hak asasi manusia lama semakin menjemukan untuk diperbincangkan di negara-negara sedang berkembang. Kenyataan yang ada secara sini menunjuk kepada hal-hal tidak menggembirakan yang berlangsung di mana-mana seluruh dunia. Kegairahan pemerintahan Presiden Carter untuk membuat promosi hak-hak asasi manusia sebagai salah satu tulang punggung politik luar negerinya kini ternyata telah mengendor. Sebagian karena upaya sistematisasi sebuah kebijaksanaan menyeluruh yang menyangkut hak-hak asasi manusia membutuhkan pengendapan pemikiran dan penyederhanaan permasalahan itu sendiri (guna memungkinkan penyusunan yang lebih mantap bobotnya, tetapi lebih jauh jangkauannya), seperti tampak dalam upaya merumuskan kriteria yang lebih matang lagi guna meletakkan negara-negara di seluruh dunia dalam kategori “pemenuhan hak-hak asasi manusia” yang lebih realistis dan lebih terasa impaknya, sebagian lagi karena kenyataan pahit dalam hubungan internasional memaksakan

---

<sup>70</sup>Ibid., 110.

kesulitan-kesulitan luar biasa untuk tetap taat atas (*konsisten*) pada kehendak semula.<sup>71</sup>

### c. Demokrasi

Setelah terjadinya peristiwa tabloid Monitor dan didirikannya ICMI, Gus Dur dan sejumlah teman yang sepaham dengannya merasa prihatin dengan meningkatnya arus sektarianisme atau aliran. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membentuk suatu organisasi untuk membela pluralisme dan demokrasi. Pada awal 1991, empat puluh intelektual yang berasal dari berbagai kelompok agama dan masyarakat di Indonesia mendirikan Forum Demokrasi. Gus Dur terpilih menjadi ketua dan juru bicara forum ini. Ketenaran dan pengaruh Gus Dur akan membuat organisasi baru ini mendapatkan kepercayaan publik. Juga ia sukar dibungkam oleh rezim yang berkuasa oleh karena ia mempunyai basis massa yang luas di NU.<sup>72</sup>

Dalam sebuah tulisan tak lama setelah terbentuknya Forum Demokrasi, Gus Dur menjelaskan mengapa ia memandang penting tegaknya demokrasi. “sayang sekali, masalah sektarianisme ditangani seolah-olah penyebab, bukan akibat. Sebenarnya, inti masalahnya adalah kurangnya demokrasi dan kebebasan.

Forum demokrasi adalah kelompok kecil yang kebanyakan anggota-anggotanya bukanlah tokoh-tokoh yang menonjol. Kebanyakan

---

<sup>71</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 87-88.

<sup>72</sup>Greg Barton, *Gus Dur: Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. (Yogyakarta: LKiS, 2008), 212.

dari mereka bukan dari NU dan malah bukan pula Muslim banyak diantaranya Katolik atau Protestan, dan sebagian mempunyai latar belakang sosialis. Dua dari tokoh pentingnya adalah Marsillam Simanjuntak, seorang aktivis sosial yang lantang, dan Bondan Gunawan, seorang Jawa abangan yang juga aktif dalam masyarakat sipil.<sup>73</sup>

Kegiatan Forum Demokrasi yang saya ikut terlibat aktif didalamnya juga banyak yang mempertanyakan, bahkan mencurigai. Padahal sebenarnya banyak yang belum atau tidak mau memahami Forum Demokrasi tidak terlalu menekankan aksi dan demonstrasi, melainkan berusaha membangun kultur demokrasi di masyarakat, mengupayakan persepsi dan pengertian yang sama mengenai demokrasi di Indonesia di masa depan.<sup>74</sup>

Dengan berbagai kemungkinan dalam hubungannya dengan suksesi di tahun depan, misalnya, Forum Demokrasi lebih memusatkan kepada pembahasan mengenai demokrasi apa yang harus kita bangun, bagaimana konsep sebaiknya, kemana negara dan masyarakat harus melangkah ke depan, seraya mengembangkan pengertian tentang demokrasi di masyarakat, yang terpenting dalam kegiatan Forum Demokrasi adalah bagaimana menginformasikan kepada masyarakat tentang pemahaman demokrasi, kompleksitas pembangunan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung, dan sebagainya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid., 212

<sup>74</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), 98.

<sup>75</sup> Ibid., 98.

Bagi Gus Dur dalam bukunya yang berjudul *Islam Kosmopolitan*, Pada saat ini tampak hubungan erat antara agama dan proses demokratisasi. Dimana-mana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Dom Helder Camara, seorang uskup agung di Brasil, menggerakkan kekuatan rakyat untuk memperjuangkan demokrasi selama belasan tahun, dengan menghadapi tuduhan bahwa ia condong kepada komunisme. Ia bahkan dikenal dengan julukan “Uskup Merah” karena pemihakannya kepada gerakan rakyat. Terkenal ucapannya : “kalau saya mengumpulkan makanan untuk orang kecil saya disebut orang suci; tetapi kalau mempertanyakan sebab kemiskinan rakyat kecil itu, dengan segera saya disebut komunis”.<sup>76</sup>

Salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi di kalangan lembaga dan kelompok keagamaan adalah perbedaan hakekat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh kitab suci-Nya. Ini berarti hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebebasan ajarannya sendiri. Demokrasi, sebaliknya dari ajaran agama, justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat, dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama.

Demokrasi menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis,

---

<sup>76</sup>Wahid Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 281.



agama, jenis kelamin dan bahasa ibu. Sedangkan tiap agama tentu lebih dahulu cenderung untuk mencari perbedaan atas dasar hal tersebut di atas, minimal perbedaan agama dan keyakinan. Karena sejak lahirnya setiap agama memiliki kekhususan (unikum) nya sendiri, yang secara mendasar harus ditundukkan kepada kepentingan bersama seluruh bangsa, apalagi diinginkan agama tersebut dapat menjunjung demokrasi.<sup>77</sup>

Dalam pandangan Gus Dur demokrasi pada hakekatnya adalah suatu proses, maksudnya, demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna. Demokrasi sebagai proses adalah kadar pelaksanaan konkret dari prinsip demokrasi itulah yang menjadi ukuran penting. Nilai demokrasi bukan hanya *syura* atau permusyawaratan saja, namun ada nilai dasar lain seperti kebebasan, keadilan, dan *syura* itu sendiri. Berdasarkan gagasan Gus Dur mengenai demokratisasi, ada kecenderungan bahwa Gus Dur lebih menempatkan perjuangan umat hanya sebagai bagian dari perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis di Indonesia. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi Gus Dur adalah bagaimana mengokohkan mekanisme politik yang demokratis.

#### **d. Pribumisasi Islam**

Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>77</sup>Ibid., 287.

Orang tidak dapat berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Diantara keduanya terjadi tumpang tindih dan sekaligus perbedaan-perbedaan.<sup>78</sup>

Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya akan memungkinkan adanya persambungan antara berbagai kelompok atas dasar persamaan-persamaan, baik persamaan agama maupun budaya. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitrah rasional, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Jika sebuah stadion sebaiknya mempunyai mushalla, meskipun kecil, bukan berarti untuk mencegah tabrakan antara shalat dengan sepak bola, akan tetapi pada kenyataannya pertandingan sepak bola hampir selalu diadakan ketika waktu shalat Ashar masuk. Jadi akomodasi ini bukan dilakukan karena terpaksa akan tetapi adalah suatu yang timbul secara alami, menandai terjadinya proses pribumisasi.<sup>79</sup>

Pribumisasi Islam sangat menghargai nilai-nilai lokal dalam praktik Islam sehari-hari. Islam tak selalu Arab, karena umat Islam tumbuh di Kultur masing-masing, termasuk Indonesia. Salah satu aktualisasi Pribumisasi Islam adalah menampak berdirinya negara teologi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Gus Dur satu

---

<sup>78</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), 117.

<sup>79</sup>Ibid., 117.

garis dengan ulama Mesir, Ali Abdul Raziq, yang menyatakan tak ada negara Islam. Tak heran, saat rezim Orde Baru menyatakan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi dan partai politik, Gus Dur enteng saja menerima. Padahal, gagasan asas tunggal ditentang oleh sejumlah organisasi massa Islam.<sup>80</sup>

Pribumisasi Islam bukanlah ‘Jawanisasi’ atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash*, dengan tetap memberikan peranan kepada *Ushl Fiqh* dan *Qaidah Fiqh*. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologia atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan ghaib berikut dimensi eskatologinya dengan Islam, yang lalu kemudian membentuk panteisme.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik dinegeri asalnya maupun dinegeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah itu membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian di masuki lagi oleh kali cabangannya sehingga sungai itu semakin membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya air baru yang mengubah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini

---

<sup>80</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), 119.

mungkin terkena “limbah industry” yang sangat kotor. Tapi *tokh*, tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan itu adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.<sup>81</sup>

#### e. Pluralisme agama

Pola pandang dan sikap yang terus menghargai perbedaan dalam kerangka keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, masih tetap menjadi ciri Khas KH. Abdurrahman Wahid, mantan orang nomor satu di negeri ini. Kiai nyentrik yang akrab disapa Gus Dur ini, kembali mengingatkan pentingnya menolak penyeragaman cara pandang, sikap, maupun perilaku dalam beragama dan bernegara di negeri ini. Gus Dur dipuji karena memperjuangkan pluralisme yang berintikan pada semangat memaklumi segala perbedaan untuk kebaikan dan kemajuan bersama.<sup>82</sup>

Melalui gagasan pluralisme, Gus Dur berusaha menciptakan perdamaian di Indonesia, bahkan dunia. Pluralisme dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Ia percaya, dengan sikap toleran terhadap perbedaan tersebut akan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang harmonis. Gus Dur mengatakan perlunya tiga nilai universal, kebebasan, keadilan,

---

<sup>81</sup>Ibid., 120.

<sup>82</sup>M. Hamid, *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, ( Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mawar, 2010), 77.

dan musyawarah, untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa.<sup>83</sup>

Selain itu, disaat mayoritas umat Islam bergerak bersama-sama memperjuangkan agama Jamaah Ahmadiyah dilarang karena bertentangan dengan Syariah Islam, Gus Dur memilih membela Ahmadiyah dengan menyatakan, “sampai mati saya membela Ahmadiyah”.<sup>84</sup>

Bagi Gus Dur, semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan mereka harus dijauhkan dari diskriminasi. “semua warga negara dan keyakinan keagamaan yang dimiliki, posisinya setara dihadapan hukum dan konstitusi. Setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi atas nama apapun, termasuk atas nama agama” katanya.

Berbicara tentang pluralisme, Gus Dur berpendapat, “pluralisme bukanlah mencampuradukkan agama, itu berarti sinkritisme. Demikian juga bukan menyamakan atau menganggap agama itu satu, yang berarti singularisme, bukan pluralisme. Pluralisme justru menghargai otensitas masing-masing pemeluk agama, terus menjadi pemeluk agama yang baik, tanpa menjadi orang lain”.<sup>85</sup>

Selain dianggap sosok kontroversial, Gus Dur juga dikenal sebagai sosok yang humanis dikalangan santri dan pengajar di Pondok Pesantren Tebuireng. Dalam setiap ajarannya Gus Dur menekankan perlunya kebersamaan dan kerukunan antar-umat beragama. Sebab, hanya dengan

---

<sup>83</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 141.

<sup>84</sup>M. Hamid, *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, ( Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mawar, 2010), 140

<sup>85</sup>Najamuddin Muhammad, *Para Pejuang Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 136.

cara itu umat Islam bisa hidup damai di bumi. Meski dikenal sebagian orang sebagai pribadi yang mudah emosional, bagi para santri Tebuireng, Gus Dur sosok humanis dan tidak membedakan satu dengan lainnya.

Bagi umat katolik yang diwakili oleh Sekjen Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr. Johannes Pujosumarta Pr. Gus Dur adalah figur anutan bagi umat katolik dan sosok yang pantas dianggap sebagai guru besar dan bapak bangsa, karena melayani sesama dengan penuh kasih dan tanpa membedakan satu dengan lainnya. Hingga saat ini belum ada sosok yang menggantikan Gus Dur. Terlebih di tengah pluralisme agama di Indonesia.

Sedangkan bagi umat Buddha, Bhiksu Nana Sunaryadi menyampaikan bahwa kepergian Gus Dur tidak membawa kekhawatiran bagi umat Buddha, sebab ajaran yang disampaikan Gus Dur dapat membawa masyarakat membangun Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas berat yang harus dijaga seluruh elemen bangsa. “ancaman disintegrasi bangsa memang sangat besar. Karena itu, semua umat beragama harus bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia”.<sup>86</sup>

Menurut Gus Dur, tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada pola hidup berdampingan secara damai, karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Lebih

---

<sup>86</sup>M. Hamid, *Gus Dur Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mawar, 2010), 96-97.

dari itu penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain bisa saling member dan menerima.

Toleransi juga diajarkan dan dipraktekkan Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama dan peradaban lain itu sendiri. Gus Dur mengatakan bahwa ia akan menerima dan menyampaikan kebenaran yang datang dari manapun, apakah itu datang dari Injil, Bhagawad Gita, atau yang lain. Toleransi plus berasal dari pemikiran yang sangat mendalam tentang nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Toleransi plus memungkinkan manusia bisa melihat kebaikan dan kebenaran dari agama atau kelompok berbeda, bukan untuk menihilkan kebenaran agama yang dianutnya sendiri, tetapi justru untuk mematangkan, mendewasakan, memperkaya dan mendinamisasi pemikiran dan perilaku keagamaan sendiri dan masyarakatnya.<sup>87</sup>

- **Penghargaan**<sup>88</sup>
- Tokoh 1990, Majalah Editor, tahun 1990.
- Islamic Missionary Award dari pemerintah Mesir tahun 1991.
- Ramon Magsaysay Award, Manila, Filipina, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership tahun 1993.

---

<sup>87</sup>Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 16-18.

<sup>88</sup> M. Hamid, *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, ( Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mawar, 2010), 70.

- Penghargaan Bina Ekatama, PKBI, tahun 1994 Man Of The Year 1998, Majalah berita *Independent* (REM), tahun 1998.
- Honorary Degree in Public Administration and Policy Issues from the University of Twente, tahun 2000.
- Paul Harris Fellow, The Rotary Foundation of Rotary Internasional, tahun 2000.
- Ambassador of Peace, International and Inter-religious Federation for World Peace (IIFWP), New York, Amerika Serikat, tahun 2000.
- Public Service Award, Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, tahun 2001.
- Gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA), Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XII, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, tahun 2002.
- Pin Emas NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Indonesia, tahun 2002.
- Dare to Fall award, Billi PS Lim, penulis buku paling laris "*Dare to Fall*", Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 2003.
- World Peace Prize Award, World Peace Prize Awarding Council (WPPAC), Seoul, Korea Selatan, tahun 2003.
- Global Tolerance Award, Friends of the United Nations, New York, Amerika Serikat, tahun 2003.
- The Culture of Peace Distinguished Award 2003, International Culture of Peace Project Religions for Peace, Trento, Italia, tahun 2004.



- Anugrah Mpu Peradah, DPP perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia, tahun 2004.
- Gus Dur ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai Kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.
- Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan, Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi *The Jakarta Post*, Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan, Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain.

Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa per situ. Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan *The Jakarta Post* membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Abdurrahman Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.

- Penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Gus Dur mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.
- Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas .salah satunya dalam membela umat beragama Kong Hu Cu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Gus Dur juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi *Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study*.
- Belakangan, di awal tahun 2010, LSM Charta Politika memberikan *Lifetime Achievement Award 2009* kepada presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atas pengabdianya pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

### **Doktor Kehormatan**

Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) dari berbagai lembaga pendidikan:

- ✓ Doktor Kehormatan bidang Filsafat hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand, tahun 2000.

- ✓ Doktor Kehormatan bidang ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbone, Paris, Prancis, tahun 2000.
- ✓ Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, tahun 2000.
- ✓ Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India, tahun 2000.
- ✓ Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang, tahun 2002.
- ✓ Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel, tahun 2003.
- ✓ Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan, tahun 2003.
- ✓ Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan, tahun 2003.